

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan luas daratan sekitar 8.269,72 km² dan perairan mencapai 417.012,97 km². Wilayah ini terdiri atas dua Kota, yaitu Batam dan Tanjungpinang, serta lima kabupaten: Bintan, Lingga, Karimun, Natuna, dan Kepulauan Anambas. Letaknya yang strategis menjadikan provinsi ini memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha pengolahan hasil laut, khususnya di sektor perikanan dan kelautan (*Sumber: BPS Kepulauan Riau*).

Kabupaten Bintan sendiri merupakan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki total wilayah 88.038,54 km². Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 2,21% atau 1.946,13 km² merupakan daratan, sedangkan sisanya berupa wilayah laut. Kabupaten ini dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, khususnya hasil laut yang melimpah. Potensi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, tetapi juga memperkenalkan Kepulauan Riau sebagai salah satu daerah penghasil olahan laut berkualitas yang mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Salah satu wilayah di Kabupaten Bintan, yaitu Kelurahan Sei Lekop di Kecamatan Bintan Timur, merupakan hasil pemekaran dari kecamatan tersebut.

Kabupaten Bintan, yang dikenal sebagai wilayah maritim dengan hasil tangkapan ikan dan sumber daya laut lainnya yang berlimpah, menjadikan

masyarakat setempat banyak memanfaatkan hasil laut tersebut sebagai bahan baku produk makanan, seperti kerupuk tamban. Mayoritas penduduknya telah mengembangkan industri rumah tangga untuk meningkatkan penghasilan. Di samping itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga berperan penting dalam upaya pengetasan kemiskinan dengan mendorong peningkatan daya saing serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Sektor UMKM terbukti menjadi peyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja.

Indonesia merupakan negara berkembang yang tidak terlepas dari berbagai aktivitas usaha yang dijalankan oleh individu maupun kelompok dalam bentuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan bentuk usaha yang paling banyak dijalankan oleh masyarakat di Indonesia. Keberadaan UMKM terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Dalam memulai usaha, tujuan utama pelaku usaha adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, sehingga penting bagi perusahaan untuk menjaga keberlangsungan operasionalnya. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, maka semakin menunjukkan bahwa usaha tersebut mengalami perkembangan. Oleh karena itu, keberadaan informasi dalam bentuk laporan menjadi sangat penting bagi perusahaan. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat analisis yang menyajikan data terkait kondisi keuangan, performa usaha, serta arus kas dari suatu entitas, dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

PSAK No. 1 menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari beberapa komponen, seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi

komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta laporan posisi keuangan awal periode. Laporan keuangan memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan karena menyajikan informasi terkait performa keuangan usaha, membedakan aset bisnis dengan aset pribadi, serta menunjukkan arus kas selama periode tertentu.

PSAK No. 1 juga mengatur seluruh ketentuan dalam penyusunan laporan keuangan yang digunakan secara umum, dengan memberikan panduan mengenai struktur, isi minimum, dan pengungkapan yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan. Tujuan utama dari PSAK No. 1 adalah memastikan bahwa informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode laporan suatu entitas.

Namun, permasalahan yang kerap dihadapi UMKM adalah kebiasaan hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran kas, tanpa mencatat aktivitas ekonomi lainnya. Meskipun pencatatan kas masuk dan keluar dapat memberikan gambaran pendapatan dan biaya operasional, banyak pelaku UMKM merasa bahwa informasi tersebut sudah cukup, sehingga enggan menyusun laporan keuangan yang lebih lengkap. Akibatnya, para pelaku usaha sering kali tidak memiliki gambaran yang utuh mengenai perkembangan usahanya serta tidak mengetahui secara pasti rincian aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki.

Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) merupakan entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana dijelaskan dalam SAK ETAP, dan memenuhi definisi serta kriteria UMKM berdasarkan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut.

Pada tahun 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berada di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan dan meyetujui Standar Akuntansi Keuangan untuk EMKM (SAK EMKM). Standar ini mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2018 dan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. SAK EMKM menawarkan ketentuan akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP, sehingga diharapkan dapat membantu pelaku UMKM untuk berkembang dan lebih mandiri dalam melakukan pencatatan laporan keuangan usahanya.

Karena informasi akuntansi memiliki peran penting dalam keberhasilan usaha, terutama bagi UMKM, maka keberadaan informasi ini dapat menjadi dasar yang dapat dipercaya untuk memperoleh pembiayaan dari bank, melaporkan kewajiban pajak, serta menjadi acuan dalam pengambilan keputusan internal perusahaan seperti pengolahan bisnis, strategi pemasaran, penentuan harga dan lainnya. Dengan demikian, penerapan SAK EMKM diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme pelaku UMKM secara keseluruhan.

Salah satu usaha menengah yang mengalami kendala dalam penyusunan laporan keuangan adalah usaha Kerupuk Ikan Tamban milik Ibu Tatik. Usaha ini bergerak di bidang manufaktur yaitu mengolah ikan menjadi produk kerupuk siap konsumsi yang kemudian dipasarkan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap pemilik usaha yang menjadi responden, diketahui

bahwa pencatatan usaha ini masih dilakukan secara sederhana, khususnya dalam modal dan pelaporan keuangan yang dalam hal modal dan pelaporan keuangan yang belum sepenuhnya mengikuti Standar Akuntansi Keuangan.

Oleh karena itu, peneliti berinisiatif untuk memperkenalkan dan membimbing pelaku usaha dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan SAK EMKM. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Pada Usaha Produksi Kerupuk Ikan Tamban Di Perumahan Korindo Perum Griya Indo Kencana Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, dapat diidentifikasi bahwa pemilik Usaha Kerupuk Ikan Tamban Ibu Tatik, yang berlokasi di Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, belum memahami cara menyusun laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Oleh karena itu, perlu diberikan pemahaman dan penerapan langsung terkait penyusunan laporan keuangan tersebut dalam usahanya.

1.3 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Laporan Laba Rugi untuk periode bulan Desember tahun 2023 pada Usaha Kerupuk Ikan Tamban milik Ibu Tatik berdasarkan SAK EMKM?

1.4 Pembatasan Masalah

Agar penelitian tetap fokus dan tidak melebar dari tujuan utama, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian dibatasi pada Perumahan Korindo, Perum Griya Indo Kencana, Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, untuk tahun 2023.
2. Fokus penelitian ini adalah pada penyusunan laporan laba rugi berdasarkan standar SAK EMKM.
3. Subjek penelitian terbatas pada usaha Kerupuk Ikan Tamban yang dimiliki oleh Ibu tatik.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumus masalah, tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk dan penyusunan Laporan Laba Rugi Pada Usaha Kerupuk Ikan Tamban milik Ibu Tatik.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Pelaku Usaha
Memberikan wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya menyusun laporan keuangan secara sistematis dalam menjalankan bisnis.

2. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman langsung dalam kegiatan penelitian serta meningkatkan kemampuan dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh ke dalam praktek nyata di masyarakat.

3. Bagi Akademisi

Menambah pengetahuan serta menyediakan informasi yang berguna mengenai pelaporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1.7 Sistematika Penulis

Penulisan dalam penelitian ini disusun ke dalam beberapa bab secara terstruktur sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang diharapkan, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Bagian ini mengulas teori-teori yang relevan sebagai dasar bagi variabel yang digunakan dalam penelitian, menyusun kerangka berpikir, serta mengembangkan dan merumuskan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek dan cakupan penelitian, pendekatan dan metode yang digunakan, definisi variabel, teknik pengumpulan data, metode penentuan populasi dan sampel, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, disertai dengan analisis dan interpretasi data. Pembahasan dikaitkan dengan teori yang relevan serta pengujian hipotesis berdasarkan metode yang telah ditentukan.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait guna memberikan kontribusi dan manfaat dari hasil penelitian.